

KETIMPANGAN GENDER DAN KETIMPANGAN SOSIAL DITENGAH MASYARAKAT

Melli Yusridah¹, Mangaraja Manurung², Yudha Andriko³, Hariyadi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Asahan

yusridahmelli@gmail.com

ABSTRACT; *Gender inequality is the unequal distribution of wealth, power, and benefits between women and men. The Gender Inequality Index (GII) method is a tool to measure gender inequality through three dimensions, namely the dimension of reproductive health, the dimension of empowerment and the dimension of labor force participation. The first objective of this study is to measure the level of gender inequality index in Bumaji Regency. Overall, the findings of the study showed that poor households had higher gender inequality compared to non-poor groups. The dimensions of reproductive health and empowerment are the dimensions that have the most influence on the gender inequality index in Bumaji Regency. Thus, one of the policies to reduce the value of gender inequality in each village, the Batu City government should pay special attention to efforts to improve maternal reproduction and the health of women of productive age, such as.*

Keywords: *Gender Studies.*

ABSTRAK; Suatu Ketimpangan gender adalah ketidaksetaraan distribusi kekayaan, kekuasaan, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki. Metode Gender inequality Index (GII) merupakan alat untuk mengukur ketimpangan gender melalui tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan dan dimensi partisipasi angkatan kerja. Tujuan pertama pada penelitian ini adalah mengukur tingkat indeks ketimpangan gender di Kabupaten Bumaji. Secara keseluruhan, temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok rumah tangga miskin memiliki ketimpangan gender lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok masyarakat tidak miskin. Dimensi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan merupakan dimensi yang paling berpengaruh terhadap indeks ketimpangan gender di Kabupaten Bumaji. Dengan demikian, salah satu kebijakan untuk menurunkan nilai ketidaksetaraan gender di setiap desa, pemerintah Kota Batu seyogyanya memberikan perhatian khusus pada upaya peningkatan reproduksi ibu dan kesehatan perempuan usia produktif, serta kesamaan akses pendidikan bagi perempuan khususnya pada pendidikan SMA sebagai salah satu bagian dari upaya pemenuhan APM daerah dengan lama.

Kata Kunci: Kajian Gender.

PENDAHULUAN

Suatu pembangunan tidak lepas dari pengaruh sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan, dimana pembangunan manusia perlu ditinjau dari kualitas hidup dan potensi

manusia di suatu negara (Badan Pusat Statistika, 2018). Keberhasilan suatu pembangunan yang I. R. D. Ari, B. S. Waloejo, S. Hariyani/ JPK Vol. 10 No. 1 (2022) 23-35 24 dilakukan oleh pemerintah dan swasta dipengaruhi oleh seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan (United Nation Development Programme, 2016). Dalam kata lain, pencapaian kesetaraan gender yang diperlukan adalah kesempatan atau peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Menurut Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing sesuai pada instruksi presiden kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Kesetaraan gender menjadi fokus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pilar 5, yaitu pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk akses universal terhadap informasi dan teknologi, sampai dengan kebijakan publik yang pro-perempuan. Pemberdayaan perempuan ditujukan untuk memberikan kekuatan bagi perempuan untuk berbicara dalam pengambilan keputusan, kekuatan dalam kegiatan ekonomi, dan kekuatan untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada (Rahman, 2013). Hal ini sesuai dengan tujuan pengukuran Gender Inequality Index (GII) yang ingin mengatasi kondisi ketimpangan gender. Pandangan masyarakat bahwa perempuan memiliki keterbatasan dalam segala hal dibandingkan dengan laki-laki (UN Women, 2014) merupakan catatan khusus dalam upaya pencapaian kesetaraan gender itu sendiri. Secara lebih khusus, kesetaraan gender juga merupakan masalah yang terjadi di Indonesia, dimana Indonesia berada pada peringkat 85 dari 153 negara (0,70) dan angka tersebut tidak berubah sejak tahun 2018 sebagaimana dikemukakan dalam Laporan TheGlobal Gender Gap Index 2020, World Economic Forum (Wulandari, 2020). Kesetaraan gender yang baik antara laki-laki dan perempuan terjadi jika dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berekonomi dilakukan secara adil tanpa adanya perbandingan gender (Badan Pusat Statistika Kota Batu, 2019a). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat perbedaan hak penggunaan fasilitas antara laki-laki dan perempuan. Hal ini yang menyebabkan adanya ketimpangan

sehingga perempuan hidup lebih tertinggal dalam memperoleh kualitas hidup yang lebih baik (Bangun, 2021). Modal sosial yang merata antara laki-laki dan perempuan merupakan aset bagi individu karena dapat memberikan akses ke sumber daya dan fasilitas (Muñoz-Goy, 2013). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan modal sosial adalah kebiasaan, kedudukan (peranan aktor), pendidikan, kelas sosial ekonomi dan nilai-nilai personal (Fathy, 2019). Modal sosial yang baik dapat meningkatkan taraf hidup seseorang melalui hubungan yang baik. Sehingga modal sosial ini dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat baik laki-laki atau perempuan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, pendidikan maupun kesehatan (Putnam, 2000). Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan TPB yang harus dicapai yaitu pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender. Program kesetaraan gender merupakan hal yang penting dalam pengembangan pembangunan daerah. Kebijakan publik sudah tertuang dalam peraturan dan perundangan di Indonesia. Kebijakan tersebut antara lain tercantum dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa partisipasi politik dalam mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah menyebutkan bahwa pemerintah membuat strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender. Penelitian ini mengambil studi kasus pada Kecamatan Bumiaji Kota Batu Provinsi Jawa Timur, untuk lebih mampu memberikan potret secara detail mengenai isu gender dan modal sosial pada wilayah perkotaan yang mengalami pertumbuhan pembangunan yang pesat. Berdasarkan Kecamatan Bumiaji Dalam Angka Tahun 2018, diketahui jumlah penduduk laki-laki sebanyak 29.246 orang atau sekitar 51% dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 28.876 orang atau sekitar 49% (Badan Pusat Statistika, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi jumlah, penduduk perempuan di Kecamatan Bumiaji memiliki kesempatan yang lebih besar dalam kegiatan pembangunan karena jumlah penduduk perempuan yang hampir sebanding dengan jumlah laki-laki. Tujuan utama penelitian ini untuk menyelidiki keterkaitan antara nilai kesetaraan gender dengan ikatan sosial dalam masyarakat, guna menyusun rekomendasi kebijakan publik dalam pengentasan kemiskinan. Tujuan pertama penelitian adalah mengukur indeks kesetaraan gender berdasarkan Gender Inequality Index (GII) yang meliputi tiga dimensi. Dan tujuan kedua adalah memahami struktur sosial masyarakat melalui pendekatan Social Network Analysis (SNA) dengan pengukuran 2 indeks modal sosial (Ari, Hasyim, Pratama, Helmy, & Sheilla, 2017).

Penelitian pada tingkat kecamatan dengan unit analisis desa/kelurahan akan memberikan kontribusi penting pada upaya penyusunan kebijakan publik pencapaian kesetaraan gender yang selama ini masih dilakukan di level meso (kota/kabupaten) ataupun makro (nasional/internasional), yang sangat memungkinkan terjadinya generalisasi yang terlalu lebar dan memunculkan bias pada kebijakan pembangunan yang tersusun.

METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan penelitian empiris dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara survei primer dan survei sekunder. Survei primer dilakukan dengan cara mendistribusikan kuisisioner dan observasi lapangan. Sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan studi literatur dan survei ke instansi-instansi terkait. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Kecamatan Bumjai dalam satuan Kepala Keluarga (KK). Sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin sehingga didapat jumlah sampel sebesar 330 KK sebagai representatif rumah tangga (RT) yang ada, yang selanjutnya didistribusikan secara proporsional ke dalam 9 desa. Selanjutnya, sampel yang telah diproporsional ke setiap desa dibagi menjadi sampel rumah tangga miskin dan tidak miskin berdasarkan data jumlah rumah tangga miskin (rumah tangga penerima beras miskin) setiap desa. Secara lebih detail, penelitian ini mengasumsikan rumah tangga penerima program beras miskin dalam klasifikasi rumah tangga miskin, dan sebaliknya.

Gender Inequality Index (GII)

GII atau indeks ketidaksetaraan gender merupakan analisis untuk mengukur ketidaksetaraan gender yang dikeluarkan oleh United Nation Development Programme (2016). Pada penelitian ini pengumpulan data untuk analisis GII dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner kepada sampel terpilih berupa data atribut KK, dan pengolahan datanya dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel–Office 365 (lisensi Universitas Brawijaya). Perhitungan GII memiliki 3 dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan angkatan kerja/pasar tenaga kerja. Dimensi kesehatan diukur melalui rasio angka kematian ibu melahirkan dan tingkat kesuburan remaja. Dimensi pemberdayaan merepresentasikan persentase penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki posisi di parlemen, dan memiliki pendidikan minimal SMA. Dimensi partisipasi angkatan kerja diukur melalui partisipasi perempuan di dunia kerja. Nilai GII bervariasi antara 0–1, dimana nilai 0 menunjukkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sementara nilai 1

menunjukkan terjadinya ketimpangan atau ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan pada semua dimensi. Dengan demikian, masyarakat dengan nilai GII semakin rendah mempunyai peluang lebih baik untuk terwujudnya kesejahteraan dalam suatu wilayah tersebut, dikarenakan adanya kondisi yang lebih setara diantara laki-laki dan perempuan pada semua dimensi kehidupan. Secara lebih detail desain GII dalam penelitian ini.

Social Network Analysis (SNA)

Metode pendekatan SNA dalam penelitian ini, ditujukan sebagai alat analisis untuk memetakan struktur sosial pada suatu masyarakat melalui konektivitas antara anggota masyarakat dalam keanggotaannya pada suatu lembaga dalam suatu jaringan kerja dengan studi kasus masyarakat di Kecamatan Bumijai Kota Batu (Ari, Waloejo, & Hariyani, 2019). Persyaratan jenis data yang digunakan pada SNA adalah data afiliasi keanggotaan responden terhadap kelembagaan yang diikuti (Ari, Hariyani, & Waloejo, 2021). Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada sampel terpilih yang kemudian dianalisis menggunakan bantuan aplikasi UCINET 6.742. Ikatan sosial dalam kelompok masyarakat dapat diketahui dari keikutsertaan masyarakat dalam kelembagaan tertentu, semakin aktif masyarakat dalam suatu kelembagaan maka peluang untuk mendapatkan informasi lebih besar (Putnam, 1993). Pada penelitian ini, indeks modal sosial yang diukur dengan pendekatan SNA terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Rate of Participation (RoP) dan densitas, tercantum pada Tabel 1. Kedua pendekatan tersebut mengacu pada teori dari Wasserman dan Faust (1994), yang selanjutnya dibagi menjadi tiga klasifikasi yaitu tinggi, sedang, rendah (Ari dkk., 2017). Asumsi dasar pada penelitian ini bahwa masyarakat dengan tingkat partisipasi dan densitas yang semakin tinggi mempunyai peluang lebih tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada wilayah terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Asahan merupakan satu dari 3 kecamatan di Kota Kisaran, Sumatera Utara Indonesia yang memiliki sembilan desa yaitu Pandanrejo, Bumiaji, Bulukerto, Gunungsari, Puntan, Tulungrejo, Sumbergondo, Giripurno dan Sumber Brantas. Secara geografis, Kecamatan Bumiaji terletak di daerah perbukitan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bumiaji sebanyak 207.490 jiwa (Badan Pusat Statistika Kota Batu, 2019b). masyarakat Kota Batu tahun 2017–2019 dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan masa studi selama 12 tahun, sebagaimana tercantum pada Tabel 2. Secara umum data statistik

menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Batu semakin turun sejalan semakin lamanya masa studi. Dengan kata lain, bahwa jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan dasar (SD) ada pada persentase tertinggi, yang selanjutnya semakin turun pada tingkat pendidikan menengah pertama (SMP) dan menengah atas (SMA). Sesungguhnya menurut dalam Kerangka Pembangunan Pendidikan (BAPPENAS, 2016), standar lama mengenyam pendidikan penduduk Indonesia secara nasional ditetapkan selama 12 tahun (SD – SMP – SMA).

Apabila diperhatikan berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa pada jenjang pendidikan SD dan SMA, prosentase siswa perempuan lebih banyak daripada siswa laki-laki, dan pengecualian terjadi pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP) dengan prosentase siswa laki-laki lebih tinggi dibanding siswa perempuan. Secara keseluruhan, Tabel 2 menunjukkan bahwa 78,51% perempuan di Kota Batu pada tahun 2019 telah mengenyam pendidikan SMA, sebagai indikasi yang cukup baik terkait akses pendidikan bagi laki-laki dan perempuan di Kota Batu. Ketidaksetaraan gender merupakan isu penting yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, khususnya penduduk perempuan. Berdasarkan pengukuran GII atau Indeks Ketimpangan Gender oleh United Nation Development Programme (2016), menunjukkan bahwa ada 2 (dua) indikator untuk menghitung dimensi kesehatan reproduksi yaitu Rasio Kematian Ibu (AKI) dan Rasio Kelahiran Remaja (ABR). Rerata Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kelahiran Remaja (AFR) disebut Geometric mean Female (GF). Dimensi kedua adalah dimensi pemberdayaan, mengukur pendidikan minimum pada penduduk laki-laki (SEfM) dan laki-laki atau perempuan yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (parlemen) (PRM). Ratarata geometrik laki-laki (GM) adalah rata-rata pendidikan minimum pada penduduk perempuan atau laki-laki (SEfM) dan laki-laki yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (parlemen) (PRM). Dimensi terakhir adalah dimensi angkatan kerja atau pasar tenaga kerja, dengan 1 (satu) indikator yaitu jumlah pasar tenaga kerja. Terdapat 5 (lima) langkah untuk menghitung tingkat ketimpangan gender di Kabupaten Bumiaji. Pertama mengukur nilai indeks perempuan (Gf) dan nilai indeks laki-laki (Gm). Langkah kedua, mengukur agregasi harmonik kedua nilai indeks perempuan (Gf) dan nilai indeks laki-laki (Gm). Selanjutnya, yang ketiga adalah menghitung setiap dimensi. Langkah keempat adalah penjumlahan indeks dimensi. Langkah terakhir adalah mengukur nilai indeks ketidaksetaraan gender dengan membandingkan antar indeks. Indeks perempuan dan indeks laki-laki merupakan langkah awal untuk mengukur indeks ketidaksetaraan gender. Tabel

3 merupakan hasil penghitungan nilai indeks perempuan (Gf) dan nilai indeks laki-laki (Gm) masing-masing desa di Kecamatan Bumiaji. Berdasarkan Tabel 3, untuk sampel RT miskin, Desa Tulungrejo memiliki nilai indeks perempuan (Gf) terendah (0,12553), sementara Desa Punten memiliki nilai indeks perempuan tertinggi (Gm) (0,20927). Nilai indeks laki-laki (Gm) tertinggi terdapat di Desa Pandanrejo (1,12626), sementara itu nilai indeks laki-laki (Gm) terendah sebesar (0,77560) ditemukan di Desa Sumbergondo. Nilai indeks perempuan (Gf) sampel RT tidak miskin menunjukkan bahwa Desa Giripurno memiliki nilai terendah (0,10509) dan Modal sosial merupakan salah satu bentuk modal yang unik yang membuatnya), yang akan semakin tinggi manfaatnya ketika difungsikan sebagai produk investasi masyarakat melalui waktu dan usaha dalam jangka waktu tertentu (Ostrom & Ahn, 2003). Berdasarkan hasil perhitungan RoP dan densitas di Kecamatan Bumiaji dapat diketahui bahwa tingkat RoP dan densitas pada kelompok masyarakat miskin lebih rendah dibanding dengan kelompok masyarakat tidak miskin. Kejadian pada wilayah studi membuktikan bahwa ikatan sosial yang tinggi– ditunjukkan dengan nilai rata-rata partisipasi dan densitas yang tinggi, memberikan peluang bagi anggota masyarakat untuk terjalannya transfer informasi, pengetahuan maupun sumber daya yang lebih baik, dimana hubungan ikatan sosial yang lebih kuat tersebut membuka peluang lebih besar bagi penduduk untuk mendapatkan kesempatan lebih tinggi dalam mencapai kesejahteraan hidup (Putnam, 2000).

Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak miskin akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat melalui pertukaran arus informasi, pengetahuan dan sumber daya dari lembaga yang mereka ikuti secara lebih lancar. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian (Ari dkk., 2019), bahwa jejaring sosial masyarakat yang tinggi memberikan kemungkinan bagi masyarakat untuk lebih mudah berinteraksi dan berbagi informasi/ pengetahuan/ sumber daya antar dan diantara anggota masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ketimpangan gender adalah ketidaksetaraan distribusi kekayaan, kekuasaan, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki. Metode Gender inequality Index (GII) merupakan alat untuk mengukur ketimpangan gender melalui tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan dan dimensi partisipasi angkatan kerja. Tujuan pertama pada penelitian ini adalah mengukur tingkat indeks ketimpangan gender di Kabupaten Bumaji. Secara

keseluruhan, temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok rumah tangga miskin memiliki ketimpangan gender lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok masyarakat tidak miskin. Dimensi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan merupakan dimensi yang paling berpengaruh terhadap indeks ketimpangan gender di Kabupaten Bumiaji. Dengan demikian, salah satu kebijakan untuk menurunkan nilai ketidaksetaraan gender di setiap desa, pemerintah Kota Batu seyogyanya memberikan perhatian khusus pada upaya peningkatan reproduksi ibu dan kesehatan perempuan usia produktif, serta kesamaan akses pendidikan bagi perempuan khususnya pada pendidikan SMA sebagai salah satu bagian dari upaya pemenuhan APM daerah dengan lama masa studi selama 12 tahun. Tujuan penelitian kedua adalah mengukur 2 (dua) indeks modal sosial melalui pendekatan metoda Social Network Analysis (SNA) pada responden yang sama dengan klasifikasi yang sama seperti pada pengukuran tingkat GII di tujuan pertama penelitian. Input data afiliasi berupa keikutsertaan anggota masyarakat pada kelembagaan yang ada, kemudian diukur dengan RoP dan densitas. Temuan perhitungan menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin memiliki modal social yang lebih rendah dibandingkan kelompok masyarakat tidak miskin.

Dengan kata lain, ikatan sosial diantara anggota masyarakat tidak miskin lebih tinggi dibandingkan dengan ikatan sosial yang terjadi diantara anggota masyarakat miskin. Temuan penelitian ini sekaligus membuktikan bahwa kualitas modal sosial mempunyai peranan yang signifikan dalam membuka peluang lebih tinggi bagi masyarakat dan diantara anggota masyarakat untuk menjadi sejahtera. Selanjutnya penelitian ini mencoba untuk mencari hubungan antara tingkat kesetaraan/ ketidaksetaraan gender melalui pengukuran GII dengan tingkat modal sosial atau ikatan sosial antara anggota masyarakat melalui pengukuran RoP dan densitas dengan pendekatan SNA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok anggota masyarakat miskin secara umum memiliki tingkat GII lebih tinggi dan tingkat modal sosial lebih rendah dibandingkan dengan anggota masyarakat dalam kelompok tidak miskin. Ketika kebijakan pemerintah/ pemerintah daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka nampaknya adalah tidak terelakkan bagi pemerintah/ pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus terhadap upaya-upaya kebijakan penurunan ketimpangan/ ketidaksetaraan gender melalui peningkatan ikatan sosial diantara anggota masyarakat secara terintegrasi dan tersinergi. Peningkatan kesadaran kesehatan reproduksi diantara anggota masyarakat khususnya perempuan bisa dilakukan melalui peningkatan kompetensi pendidikan perempuan melalui

jalur lembaga pendidikan formal maupun informal. Selanjutnya, perkuatan ikatan sosial diantara anggota masyarakat bisa diperkuat melalui transformasi informasi/ pengetahuan ataupun sumber daya diantara masyarakat melalui keikutsertaan yang semakin aktif pada kelembagaan formal maupun informal yang ada. Pada akhirnya, ikatan sosial yang kuat tersebut akan semakin membuka peluang perbaikan struktur sosial masyarakat menuju masyarakat yang lebih berdaya guna dan sejahtera, sebagaimana disampaikan oleh Abdurrahman dan Tusianti (2021) dimana keikutsertaan perempuan dalam kelembagaan atau organisasi bermanfaat baik untuk pengembangan kapasitas perempuan dan mengecilkan angka ketimpangan gender.

Dengan demikian, penelitian ini mencoba untuk mengusulkan penyempurnaan kebijakan program pengentasan kemiskinan masyarakat melalui integrasi perencanaan pembangunan fisik dan sosial yang sinergis antar berbagai lembaga/ institusi formal maupun informal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A., & Tusianti, E. (2021). Apakah Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi dan Politik Telah Meningkatkan IPM Perempuan Indonesia? *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 204-219. doi: <https://doi.org/10.21002/jepi.v21i2.1319>
- Ari, I. R. D., Hariyani, S., & Waloejo, B. S. (2021). Spatial Modelling of Multidimensional Poverty in Rural Area: Evidence from Malang Regency, Indonesia. *Journal of Socioeconomics and Development*, 4(2), 198-211. doi: <https://doi.org/10.31328/jsed.v4i2.2245>
- Ari, I. R. D., Hasyim, A. W., Pratama, B. A., Helmy, M., & Sheilla, M. N. (2017). Infrastructure and Social Tie: Spatial Model Approach on Understanding Poverty in Malang regency, Indonesia. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.
- Ari, I. R. D., Waloejo, B. S., & Hariyani, S. (2019). Perspective of Social Capital into Poverty Level of the Community, Case Study Bumiaji District, Batu City, Indonesia. *International Journal Of Engineering Research & Technology (IJERT)* Volume, 8(8), 707-714.
- Badan Pusat Statistika. (2018). *Indeks Pembangunan Manusia 2018*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistika Kota Batu. (2019a). *Angka Partisipasi Murni*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistika Kota Batu. (2019b). *Kecamatan Bumiaji Dalam Angka tahun 2018*. Jakarta: BPS.
- Bangun, W. (2021). *The Gender Inequality Index: Indonesian Efforts*

to Enhance Human Development within ASEAN. Journal of Southwest Jiaotong University, 56(1). doi: <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.56.1.7> BAPPENAS. (2016).